

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNG JAWABAN
(LKPJ)**

DAN

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
(LPPD)**

**DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA**

TAHUN 2016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dalam pelaksanaan program, kegiatan yang telah disusun melalui Renstra dan Renja. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok yang merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah, sebagai unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu sesuai dengan lingkungan tugasnya di Bidang Transportasi dan Informatika.

Dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah tahun 2016-2021 serta mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Solok serta budaya yang hidup dalam masyarakat, maupun kondisi alam yang dimiliki maka ditetapkan Visi Kabupaten untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Solok yang Maju dan Mandiri Menuju Kehidupan Masyarakat Madani dalam Nuansa Adat Basandi Syara', Syara' basandi Kitabullah"

Dalam upaya mendukung pencapaian visi tersebut diatas, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok telah menetapkan Rencana Strategis untuk kurun waktu 2016-2021, yaitu rencana lima tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategis, Kebijakan dan Program di bidang Transportasi Komunikasi dan Informasi melalui rencana strategis. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika memuat berbagai kebijakan dalam upaya Peningkatan Aksesibilitas Transportasi dan

Komunikasi di Kabupaten Solok, dan juga sebagai sarana untuk mengukur berhasil atau tidaknya suatu program yang dilaksanakan.

1.2. Tujuan

Tujuan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok dimaksudkan untuk memberikan laporan bagaimana pelaksanaan program, kegiatan serta arah kebijakan dalam strategi pembinaan dan pemberdayaan dalam pelaksanaan Transportasi dan Komunikasi di daerah untuk kurun waktu 2016-2021 serta sebagai bahan penyusunan LPPD Kabupaten Solok dengan bertitik tolak pada Visi dan Misi Jabatan Bupati Solok periode 2016 – 2021, dengan menyusun Renstra DISHUBKOMINFO yaitu :

- a. Menetapkan Visi dan Misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok
- b. Mengerahkan potensi dan peluang yang dimiliki untuk peningkatan Transportasi dan Informasi serta Komunikasi di daerah.
- c. Menyusun tolak ukur evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi secara proporsional
- d. Mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan Transportasi Komunikasi dan Informasi yang sinergis dan terpadu antara Perencanaan pembangunan nasional.

1.3. Dasar Hukum

Landasan hukum terbentuknya Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Solok adalah :

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dalam pelaksanaan program, kegiatan yang telah disusun melalui Renstra dan Renja
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 No. 89, Tambahan lembaran Negara No. 4741);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 sampai dengan tahun 2015;

1.4. Ruang Lingkup dan Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan LKPJ dan LPPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2016 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang, tujuan, dasar hukum, ruang lingkup dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM

Berisikan tentang profil SKPD dan gambaran umum .

BAB III Urusan DESENTRALISASI

Berisikan tentang Prioritas urusan yang wajib dilaksanakan dan Prioritas urusan pilihan.

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

Berisikan tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan.

BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN.

Berisikan Kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, Pembinaan batas wilayah, dan penyelenggaraan ketentaraman dan ketertiban umum.

BAB VI INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN KAEDAH CAPAIAN

Berisi kaedah capaian dan indikator kinerja utama terhadap program dan kegiatan.

BAB VII PENUTUP

oooOOOooo

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Profil SKPD

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok merupakan lembaga teknis daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Transportasi dan Komunikasi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika terdiri dari Kepala, dan unsur pelaksana.

A. Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2010 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan Tranportasi yang mencakup pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan Transportasi Komunikasi dan Informasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta Tranportasi;
4. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumbangan pihak lain;
5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Disamping itu Dishubkominfo mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan Transportasi Komunikasi dan Informatika serta penanganan dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Transportasi komunikasi dan Informasi secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

1. Sekretaris

Mempunyai tugas pokok dalam penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta administrasi keuangan, umum dan kepegawaian.

Fungsi :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian
- c. Pengelolaan administrasi keuangan
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga Dinas
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang
- h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana
- j. Membuat laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan kegiatan dan tugas
- k. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

2. Sub. Bagian

(1) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas :

- a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat pengadaan naskah -naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan dinas
- b. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan
- c. Melaksanakan hubungan tugas bidang hubungan masyarakat
- d. Memperisapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan kenaikan pangkat, DP3, DUK, sumpah janji/ pegawai, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan pegawai dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai tenaga teknis, tenaga fungsional, analisis jabatan, analisis beban kerja, budaya kerja dan tugas usaha kepegawaian lainnya.
- e. Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan , pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan asset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;

(2) Sub. Bagian keuangan

Tugas :

- a. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai.
- b. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan.
- c. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan keuangan.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(3) Sub. Bagian Perencanaan dan pelaporan

Tugas

- a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program.
- b. Melaksanakan pengelolaan data.
- c. Melaksanakan perencanaan program.
- d. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan.
- e. Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran.
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- g. Melaksanakan penyusunan laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dan tugas.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

2. Bidang Angkutan

Tugas :

Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang Transportasi dan Rekayasa lalu Lintas serta meperlancar jaringan trayek angkutan pedesaan dalam wilayah kabupaten solok.

Fungsi :

- a. Perumusan, perencanaan kebijakan dibidang Transportasi.
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang Transportasi.
- c. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait dibidang Transportasi;
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisa pelaporan dibidang Transportasi.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada kepala Dinas oleh Bupati.

Bidang Angkutan terdiri dari atas;

1. Kasi Managemen rekayasa
2. Kasi Angkutan

Masing masing Kasi dipimpin oleh kepala seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

5. Bidang Dalops (Pengendalian dan Operasional)

Tugas :

Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pengawasan, pengaturan dan pemanduan serta penegakan hukum.

Fungsi :

- a. Penyusunan rencana Strategis dan rencana kerja dan anggaran bidang pengendalian dan operasional.
- b. Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengendalian dan Operasional.
- c. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pengawasan, pengaturan dan pemanduan serta penegakan hukum.
- d. Penegakan peraturan perundang undangan dibidang perhubungan.
- e. Pelaksanaan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- f. Pelaksanaan Pengaturan dan Pemanduan Rute Perjalanan Pemerintah Daerah dan Tamu Pemerintah Daerah.
- g. Pengkoordinasian Lintas Instansi yang berkaitan dengan pengawasan, pengaturan dan pemanduan serta penegakan hukum di bidang perhubungan; dan
- h. Pelaporan serta pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian dan Operasional.

Bidang dalops terdiri dari :

1. Kasi Operasional
2. Kasi sarana dan Prasarana

Masing-masing kasi dipimpin oleh kepala seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

6. Bidang Kominfo**Tugas :**

Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta standarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang komunikasi dan informatika.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Bidang Kominfo mempunyai fungsi.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman, petunjuk operasional di bidang Komunikasi dan informatika.
- b. Menyusun dan menganalisa data di bidang Komunikasi dan Informatika.
- c. Melakukan Bimbingan dan Penyuluhan di bidang Teknologi Informasi kepada unit unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.
- d. Penyelenggaraan Sosialisasi di Bidang Komunikasi dan Informatika di lingkungan sekolah sekolah di Kabupaten Solok.
- e. Memberikan pertimbangan teknis perijinan di bidang Komunikasi dan Informatika.
- f. Memberikan rekomendasi ijin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya Kabupaten .
- g. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

1. Kasi Postel
2. Kasi pengawasan

3. Kasi Kominfo

Masing-masing kasi dipimpin oleh kepala seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

B. Gedung kantor

Lokasi gedung kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok di Koto Baru (kantor Ex-Deppen Kabupaten Solok) dan belum memiliki kantor sendiri yang permanen dan memadai.

C. Sumber Daya Manusia Dishubkominfo

1. Internal

- Jumlah pegawai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok sebanyak 92 orang.
- Pejabat struktural eselon II/b 1 orang, eselon III/a 1 Orang, eselon III/b, 3 orang dan eselon IV/a 14 orang Esselon IV/b 4 Orang.
- Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 08 Tahun 2010.

2. Eksternal

Disamping sumber daya internal, dalam melaksanakan tugas juga terdapat sumberdaya eksternal. Sumberdaya ini terdiri dari Organda.

3. Kendala

Kendati telah ditetapkan kebijakan dibidang Perhubungan dan Komunikasi, tetapi upaya pengembangan saat ini masih dihadapkan kepada kendala-kendala sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya kerjasama Dinas Perhubungan Kabupaten Solok dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun unsur instansi terkait yang berada di Kabupaten Solok
- b. Belum memadainya sumber daya manusia, karena dari segi kuantitas maupun kualitas lembaga ini masih rendah.
- c. Sarana kerja untuk mendukung volume kerja masih belum memadai
- d. Ketersediaan dana untuk biaya operasional dalam pengelolaan Taranportasi dan komunikasi yang diharapkan belum sesuai dengan yang diharapkan.

oooOOOooo

BAB III

URUSAN DESENTRALISASI

A. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

Penanggulangan Bencana merupakan urusan yang termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan yaitu urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah dan kepegawaian. Hal-hal yang disajikan dalam laporan ini terdiri dari :

1. Program dan kegiatan
2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah pejabat struktural dan fungsional.
5. Alokasi Dana dan realisasi anggaran.
6. Proses Perencanaan pembangunan
7. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan.
8. Permasalahan dan solusi
9. Hal-hal yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

Selanjutnya urusan yang dilaksanakan oleh Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok, diilustrasikan dalam tabel III.1, III.2 dan III.3 berikut:

Lampiran III.2 : Format IKK Untuk Kabupaten
TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPDP TAHUN 2016

KABUPATEN
NAMA SKPD
URUSAN YANG DILAKSANAKAN

: SOLOK
: DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
: Urusan Perhubungan
: Urusan Kominfo

Dilisi oleh SKPD teknis yang melaksanakan 2 (dua) urusan

Halaman 1

NO.	IKK	RUMUS / PERSAMAAN	JENIS DATA		CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
			URUSAN(1)PERHUBUNGAN	URUSAN(1)KOMINFO	URUSAN 1	URUSAN 2	
1	Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah Program nasional yang dapat dilaksanakan SKPD dibagi Jumlah Program Nasional x 100 %	- Jumlah Program Nasional (RKP), sebanyak 4 Program. - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 4. Program.	- Jumlah Program Nasional (RKP), sebanyak 1 Program. - Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 1. Program.	100.00%	100.00%	FC DPA 2016
2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak 10 SOP. yang terdapat dari : 1. SOP ttg PKB 2. SOP ttg Izin usaha Angkutan Umum 3. SOP ttg Izin angkutan barang 4. SOP ttg Izin trayek 5. SOP ttg surat masuk 6. SOP ttg surat keluar dst	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak 3 SOP yang terdiri dari : 1. SOP ttg Pengurusan Izin Radio 2. SOP ttg Izin Prinsip Tower 3. SOP ttg Pengurusan Wamet 4. SOP ttg	Ada 6 SOP	ada 3 SOP	sesuai urusan
3	Jumlah Perda yg harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (Permen tentang SPM)	Jumlah Perda yg harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (Permen tentang SPM)x100%	- Perda Pelaksanaan sebanyak 2 - Perda yg seharusnya sebanyak 2	- Perda Pelaksanaan sebanyak 0 - Perda yg seharusnya sebanyak 0	100%	0%	Bergabung
4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah Jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yg ada x100%	- Jabatan yg terisi sebanyak 19 - Jabatan yg ada sebanyak 19	- Jabatan yg terisi sebanyak 4 - Jabatan yg ada sebanyak 4	100%	100%	lihat petunjuk pengisian IKK
5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur Organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur Organisasi SKPD	Apabila ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional 0	Apabila ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional 0	tidak ada	tidak ada	
6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten	PNS yang menangani urusan (1) SKPD, sebanyak 48 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 6.920 personil	PNS yang menangani urusan (2) SKPD, sebanyak 5 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 6.920 personil	0.69%	0.07%	lihat petunjuk pengisian IKK

No.	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
7	Rasio Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100 %	- Pejabat yang memenuhi syarat diklat PIM, sebanyak 4 org - Pejabat yg ada, sebanyak 19 org	100.00%	Pejabat yang memenuhi syarat diklat PIM, sebanyak 4 org
8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepegawaian	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepegawaian dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100 %	- Pejabat yang memenuhi kepegawaian, sebanyak 4 Org - Jabatan yang ada, sebanyak 19 jbt	100%	Pejabat yang memenuhi kepegawaian, sebanyak 4 Org
9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	- Apabila ada, sebutkan dokumen yg ada tahun 2016, sebanyak 4 jenis yg terdiri dari : 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD 4. Lajip SKPD 5. Laporan Keuangan (CLRK)	4 jenis dokumen	Renstra, Renja, CLRK dan RKA SKPD serta LAKIP bergabung
10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100 %	- Program RKPD yg diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 Program. - Program RKPD yg diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 Program.	100%	Mengacu Dokumen RKPD Tahun 2016 dan Renja SKPD
11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA x 100 %	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD sebanyak 4 Program - Program dalam RKA SKPD sebanyak 4 Program	100%	Mengacu Dokumen RKA SKPD Tahun 2016 dan Renja SKPD
12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD sebanyak 4 Program - Program dalam DPA SKPD sebanyak 4 Program	100%	Mengacu Dokumen RKA SKPD Tahun 2016 dan Dokumen DPA SKPD Tahun 2016

Halaman 3					
NO.	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
13	Anggaran SKPD terhadap total Belanja SKPD	Alokasi Anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	Total Anggaran SKPD sebesar Rp. 136.614.000,- Total Belanja APBD sebesar	1%	Mengacu Laporan Keuangan APBD Tahun 2016 terakhir
14	Belanja Modal Terhadap Total Belanja SKPD	Belanja Modal dibagi Total Belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD sebesar Rp 15.000.000 - Total Belanja SKPD sebesar, Rp 6.144.637.703	0.24%	
15	Total Belanja Pemeliharaan dari Total Belanja Barang / Jasa	Total Belanja Pemeliharaan dan Total Belanja Barang Jasa SKPD x 100%	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp 156.000.000,- - Total Belanja Barang dan Jasa SKPD sebesar Rp 1.340.354.804,-	0.00%	Mengacu Laporan Keuangan APBD Tahun 2014 terakhir
16	Total Belanja Pemeliharaan dari Total Belanja SKPD	Total Belanja Pemeliharaan dibagi Total Belanja SKPD x 100%	- Total Belanja Pemeliharaan SKPD sebesar Rp 63.000.000,- - Total Belanja SKPD sebesar Rp 6.144.637.703,-	0.00%	Mengacu Laporan Keuangan APBD Tahun 2014 terakhir
17	Keberadaan Laporan Keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada Laporan Keuangan SKPD berikut Komponen Yang Ada (Neraca, Calk)	Laporan Keuangan ada sebanyak 5 jenis sbb : 1. Akhir Tahun 2. Prognosis 3. Lakip 4. SPJ Fungsional 5. Neraca	Ada sebanyak 5 Jenis	Semua Laporan Bergabung
18	Keberadaan Inventarisasi Barang atau Asset SKPD	Ada atau Tidak Ada Inventarisasi Barang atau Asset SKPD	Apabila ada Lapran Keuangan sebanyak 5 jenis sbb : 1. Daftar Inventaris 2. KIB A, B, C, D, E 3. Berita acara Aset 4. Surat-surat Lain tentang Pengelolaan aset	Ada 4	Semua Dokumen Bergabung
19	Jumlah Asset yang Tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah Asset yang Tidak digunakan SKPD dibagi Total Asset Yang Dikuasai SKPD x 100%	- Asset yg tidak digunakan sebanyak 0 asset - Asset yg dikuasai sebanyak 202 asset	0.00%	Inventarisasi dilakukan Minimal 1 kali dalam 5 Tahun

NO.	IKK	RUMUS	JENIS DATA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
20	Jumlah fasilitas/sarana Informasi. 1. Papan Pengum. 2. pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil Keliling 5. Pengumuman di Mas Media 6. Baliho 7. Apil	Jumlah fasilitas / sarana Partisipasi. 1. Baliho 2. Apil 3. Papan Pengumuman 4. Mobil Keliling	Sebutkan Jenisnya : 1. Baliho 2. Mobil Keliling	Jumlah Sebanyak 4 jenis	
21	Keberadaan Survey terhadap kepuasan masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila ada, sebutkan survey kepuasan tentang.	tidak ada	Survey kepuasan masyarakat atau pelanggaran yg dilakukan oleh SKPD



DAFTAR RINCIAN TOTAL ANGGARAN SKPD, BELANJA MODAL, BELANJA PEMELIHARAAN, REALISASI BELANJA, REALISASI
BELANJA PEMELIHARAAN, BELANJA BARANG DAN JASA

NO	TOTAL ANGGARAN SKPD	TOTAL BELANJA APBD	%
1	6,144,637,703.00	1,198,534,086,449.27	0.513

NO	BELANJA MODAL SKPD	TOTAL BELANJA SKPD	%
1	592,016,000.00	6,144,637,703.00	9.63468

NO	BELANJA PEMELIHARAAN SKPD	BELANJA BARANG DAN JASA	%
1	63,000,000.00	1,340,354,804.00	4.70

NO	BELANJA PEMELIHARAAN SKPD	TOTAL BELANJA SKPD	%
1	63,000,000.00	6,144,637,703.00	1.03

	Jumlah PNS SKPD	Jml PNS Kabupaten Solok	%
	54	6,722	0.80

NO	URUSAN	IKK	KET
1	Komunikasi dan Informatika	Website milik pemerintah	ada
2		Jumlah Pameran / expo	tdk ada

KOTO BARU 1 FEBRUARI 2017
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
Drs DEDDY PERMANA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670810 198809 1 002

**INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK PERIODE 2016-2021 ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN PILIHAN**

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

URUSAN WAJIB

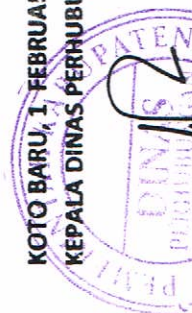
1. PERHUBUNGAN

a. Jumlah Angkutan Darat dibandingkan dengan jumlah penumpang

Rumus :	Jml Angkutan Umum x Jml tempat duduk x rit (har) x jml hari setahun	x 100 %
	Jml penumpang rata-rata kapasitas (load factor)	

NO	TAHUN	PERHITUNGAN	PERSEN	HASIL
1	2016	585 X 9 X 3 X 360	X 100%	93,68 %
		5,810,312		

**KOTA BARU, 1 FEBRUARI 2017
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**



Drs DEDDY PERMANA, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670810 198809 1 002

Prioritas Urusan Pilihan yang Dilaksanakan

Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok, **tidak terdapat** prioritas urusan pilihan yang dilaksanakan. Sesuai tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4. Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan

No	URUSAN PILIHAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	DST.....
	N I H I L		

ooo000ooo

BAB IV

TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan yang Diterima

Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok, **tidak terdapat** Tugas Pembantuan yang diterima. Sesuai tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1. Tugas Pembantuan Yang Diterima

NO	DASAR HUKUM	INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN	DST. ...
	N I H I L		

B. Tugas Pembantuan yang Diberikan

Pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok, **tidak terdapat** Tugas Pembantuan yang diberikan. Sesuai tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2. Tugas Pembantuan Yang Diterima

NO	Dasar Hukum	Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	DST....
	N I H I L		

oooOOOooo

BAB V

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

Badan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, khususnya dalam Transportasi dan Informasi belum melakukan kerjasama dengan Pemerintah terdekat sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti tercantum pada tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1. Kerjasama Antar Daerah

NO		-
Daerah Yang Diajak Kerja Sama		-
Dasar Hukum		-
Bidang Kerjasama		-
Nama Kegiatan		-
SKPD Penyelenggara		-
Target		-
Sumber Dana		-
Jumlah		-
Realisasi	Fisik	-
	%	-
	Keuangan	-
	%	-
Jangka Waktu Kerjasama		-
Hasil (out put) dari kerjasama		-
Permasalahan dan Solusi	Masalah	-
	Solusi	-
Efisiensi		-

Dalam melaksanakan kerjasama untuk Peningkatan Transportasi dan Informasi di Kabupaten Solok butuh personil (pegawai) seperti pada tabel 5.2. berikut :

Tabel 5.2. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

No	Jumlah Pegawai	Pendidikan	Pangkat	Golongan
1.	2	S.2	Pembina Utama Muda	IV.c
2.	3	S.2	Pembina Tk.I	IV.b
3.	2	S.2	Pembina	IV.a
4.	1	S.1	Pembina	IV.a
5.	1	S.2	Penata Tk.I	III.d
6.	3	S.1	Penata Tk.I	III.d
7.	1	SLTA	Penata Tk.I	III.d
8.	2	S.1	Penata	III.c
9.	2	SLTA	Penata	III.c
10.	3	SLTA	Penata Muda Tk. I	III.b
11.	3	S.1	Penata Muda	III.a
12.	1	D.3	Penata Muda	III.a
13.	6	SLTA	Pengatur	II.c
14.	1	SLTP	Pengatur	II.c
15.	2	SLTA	Pengatur Muda Tk. I	II.b
16.	1	SLTA	Pengatur Muda	II.a
17.	8	S.1	THL	-
18.	1	D.3	THL	-
19.	1	D.2	THL	-
20.	28	SLTA	THL	-
21.	5	SLTP	THL	-
22.	1	SD	THL	-

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Dalam melaksanakan penyelenggaraan tugas, Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok tidak ada ikatan kerjasama dengan pihak ketiga, seperti pada tabel 5.4 berikut:

Tabel 5.4. Tugas Pembantuan Yang Diterima

NO	Mitra yang Diajak Kerjasama	Dasar Hukum	DST...
	N I H I L		

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, khususnya dalam Peningkatan Aksesibilitas di daerah tidak melakukan koordinasi dengan Instansi Vertikal Di Daerah seperti tercantum pada tabel 5.5 berikut :

Tabel 5.5. Tugas Pembantuan Yang Diterima

NO	Forum Koordinasi	Materi Koordinasi	DST ...
	N I H I L		

D. Pembinaan Batas Wilayah

Tabel 5.6. Pembinaan Batas Wilayah

NO	Sengketa Batas	Solusi yang	DST..
	N I H I L		

E. Pengelolaan Kawasan Khusus

Untuk pengelolaan kawasan khusus, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok tidak memiliki kawasan khusus yang akan dikelola sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.8. Pengelolaan Kawasan khusus

N O	Nama kawasan khusus	Dasar Hukum	DST ...
	N I H I L		

F. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Untuk Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok tidak melaksanakan kegiatan tersebut sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.9. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

N O	Gangguan yang terjadi	SKPD yang	DST...
	N I H I L		

oooOOOooo

BAB VI

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN KAEDAH CAPAIAN

A. Kaedah Capaian

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 merupakan wujud dan komitmen Pemerintah Daerah termasuk dalam bidang Perhubungan dan Komunikasi yang dituangkan dalam Renstra Dishubkominfo dan diharapkan bisa menjadi pedoman bagi Dinas Instansi dan para pihak yang terlibat dan terkait dalam Transportasi dan Komunikasi dalam menyusun Renstra SKPD.

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Daerah dalam Penanggulangan Transportasi dan komunikasi adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah menyusun Rencana Strategis Daerah yang menjadi pedoman dalam menyusun Renstra SKPD dengan memperhatikan RPJMD 2016-2021.
2. Lembaga teknis, Dinas Teknis dan Instansi berkewajiban menjamin konsistensi dalam Rencana Daerah dibidang Perhubungan dan Komunikasi dan Renstra SKPD yang berkaitan dengan isu Perhubungan Komunikasi dan Informasi sesuai aturan perundangan.
3. Dalam meningkatkan pelaksanaan Rencana Daerah dibidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika 2016-2021, Dishubkominfo dan Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran Rencana Daerah tentang perhubungan komunikasi dan informatika 2016-2021 ke dalam Renstra / Renja setiap Dinas Instansi (SKPD).

B. Indikator Kinerja Utama

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Meningkatnya Kesiapsiagaan Dishubkominfo dan Optimalnya Penanganan keselamatan Berjalan Lintas.	1. Terwujudnya peningkatan kapasitas masyarakat tentang tertib berlalu lintas 2. Terwujudnya peningkatan kapasitas masyarakat sekolah tentang Bahaya IT melalui pelatihan. 3. Terwujudnya Sosialisasi di bidang TI. 4. Terwujudnya Penguatan Kelembagaan di bidang Perhubungan dan KOMINFO. 5. Tersedianya prasarana dan sarana Transportasi pada daerah tertinggal. 6. Terwujudnya Layanan Transportasi yang informative, lancar, aman, nyaman dan terintegrasi 7. Terwujudnya peningkatan kapasitas personil DISHUBKOMINFO melalui pelatihan secara periodik 8. Mewujudkan Kabupaten Solok melalui layanan transportasi yang handal dengan angkutan public sebagai layanan utama 9. Terwujudnya penyediaan sarana DAN PRASARANA LALU LINTAS titik yang rawan kecelakaan 10. Terwujudnya upaya penanganan lalu lintas yang cepat apabila terjadi bencana 11. Peningkatan Aksesibilitas transportasi di

	daerah sebagai pendukung Program 4 pilar Pembangunan 12. Peningkatan penyediaan Simpul Transportasi 13. Terwujudnya Jumlah APIL yang dibutuhkan 14. Mewujudkan Biaya Transoprtasi yang terjangkau bagi masyarakat.
--	--

oooOOOooo

BAB VII

PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2016 secara umum dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar mengacu kepada visi dan misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok. Dalam pencapaian visi tersebut dijabarkan kedalam misi, tujuan, sasaran dan kebijakan. Pada Tahun 2016 dilaksanakan 14 program dengan 44 kegiatan dengan dukungan dana sebesar Rp.2.202.487.104,-.

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah terwujudnya pedoman perhubungan komunikasi dan Informatika, aparatur yang handai, sarana dan prasarana yang memadai, terlaksananya Pengamanan yang terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh menuju nagari tangguh dan tingginya kesadaran masyarakat terhadap Tertib berlaiu lintas. Dari keseluruhan Sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok pada Tahun 2016 ini, semuanya dapat dicapai dengan baik. Dari keseluruhan kegiatan secara realisasi Keuangan sebesar Rp 2.021.316.782 atau 91,77%. Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut diatas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar pengambilan kebijakan Program Dishub di Kabupaten Solok.

Penyusunan LKPD dan LPPD Dinas perhubungan Komunikaasi dan Informatika ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bersama Pemerintah Kabupaten Solok terutama oleh seluruh jajaran pada Dinas

perhubungan Komunikasi dan Informatika itu sendiri yang telah melaksanakan agenda, program dan kegiatan sepanjang Tahun 2016. Apakah pelaksanaan agenda, program dan kegiatan dimaksud sudah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Renstra Dishubkominfo 2011-2015 serta Renja 2016 dan bagaimana capaian terhadap masing-masing targetnya.

Permasalahan yang ada pada Dishubkominfo, merupakan masalah universal yang menuntut keterlibatan berbagai pihak. Penanganan Transportasi dan Informasi tidak bisa ditangani oleh satu institusi yang bernama Dishubkominfo. Oleh karena itu peningkatan upaya koordinasi dengan pihak-pihak terkait merupakan suatu keharusan yang tidak boleh diabaikan.

Sejalan dengan itu upaya peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat, agar lebih dioptimalkan. Oleh karena itu perlu dialokasikan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas, melalui kegiatan pelatihan dan sosialisasi, baik untuk aparatur maupun untuk masyarakat.

Untuk meningkatkan pelayanan, perlu dilakukan penambahan 2 unit mobil yaitu 1 Mobil Derek yang akan ditempatkan di Koto Baru dan satu lagi Mobil Operasional.

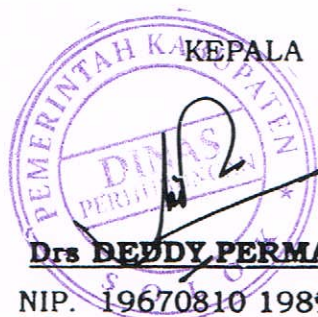
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawab (LKPJ) dan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok ini disusun mengacu kepada program, kegiatan tahun 2016 yang telah dilaksanakan.

Keberhasilan implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Solok di Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informasi sangat tergantung pada komitmen bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dengan *Stakeholders* dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Solok. Untuk itu penyusunan LKPJ dan LPPD ini dapat dijadikan pedoman dan arahan untuk tahun selanjutnya

dalam penyelenggaraan pemerintahan Dinas Perhubungan Kabupaten Solok.

Penghargaan cukup membanggakan di raih oleh Kabupaten Solok yaitu Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) tahun 2016 kategori Lalu Lintas, Terpilihnya Kabupaten Solok sebagai penerima Piala WTN tahun 2016 kategori lalu lintas tersebut tidak terlepas dari berbagai program dan inovasi yang dilakukan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok dan Instansi terkait yang tergabung dalam Forum LLAJ, berbagai inovasi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Solok mampu merubah wajah lalu lintas menjadi lebih baik. Banyak perubahan yang telah dilakukan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok untuk menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih baik, diantaranya penambahan rambu-rambu lalu lintas, penerbitan angkutan dan penganggaran perencanaan urusan Perhubungan.

Penghargaan WTN Tahun 2016 diterima langsung oleh Bpk Bupati Solok Bapak H Gusmal, SE MM yang didampingi oleh Kapolres Solok Ibuk AKBP Reh Ngenana dan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Bapak Drs Deddy Permana, MM pada tanggal 31 Januari yang lalu di Jakarta.

KEPALA

Drs DEDDY PERMANA, MM
NIP. 19670810 198909 1 002

No.	Nama Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat dan Golongan		Jumlah Jabatan		Ket
			Pangkat	Golongan	Struktural	Fungsional	
1	Drs Dedy Perdana, MM	S2	Pembina Utama Madya	IV/c	✓		PIM II
2	Drs EDITIWARMAN, MM	S2	Pembina Tk. I	IV/b	✓		PIM III
3	Nurhasanah SH. MH	S2	Pembina Tk. I	IV/a	✓		PIM III
4	Drs Syamhuris. I	S1	Pembina	IV/a	✓		Adum
5	Teuku Falsal, SH	S1	Penata Tk.I	IV/a	✓		Adum
6	Azzadi Putra	SLTA	Penata Tk.:	III/d	✓		Adum
7	Nugraha, S Sos	S1	Penata Tk.I	III/d	✓		
8	Abdillah	S1	Penata Tk.I	III/d	✓		
9	Alkama Adlis, SH. MM	S2	Penata Tk.I	III/d	✓		
10	Uman	SLTA	Penata Tk. I	III/d	✓		
11	Maryusni, S Sos	S1	Penata	III/d	✓		
12	M Jafar Jamil	SLTA	Penata	III/d	✓		
13	Ertzal BA	D3	Penata	III/d	✓		
14	Iman, SE	S1	Penata	III/d	✓		
15	Susi Erlinda, S Sos	S1	Penata	III/c	✓		
16	Derna Afrizon	SLTA	Penata	III/c	✓		
17	Adinda, A Md	D3	Penata	III/c	✓		
18	Noviardi	SLTA	Penata	III/c	✓		
19	Fakhri Omalya, S Sos	S1	Penata Muda Tk. I	III/c	✓		
20	Mhd. Nasir	SLTA	Penata	III/c	✓		
21	Palrian	SLTA	Penata Muda Tk I	III/c	✓	✓	
22	Arsad Fadillah, S.Sit	S1	Penata Muda Tk I	III/b	✓		
23	Yuskar	SLTA	Penata Muda Tk I	III/b	✓		
24	Maifarida	SLTA	Penata Muda Tk I	III/b	✓		
25	Syofni	SLTA	Penata Muda Tk I	III/b	✓	✓	
26	Yuskar	SLTA	Penata Muda Tk I	III/b	✓		
27	Wenni. J. S Sos	S1	Penata Muda Tk I	III/b	✓	✓	
28	Arsad Fadillah, S.Sit	D4	Penata Muda Tk I	III/b	✓		
29	Agus Hendra	S1	Penata Muda	III/a	✓		
30	Zondri Oki	S1	Penata Muda	III/a	✓		
31	Aljufri	SLTA	Pengatur Tk I	III/d	✓	✓	
32	Yul Akmal, A Md	D3	Pengatur	III/c	✓	✓	
33	Tadmo	SLTA	Pengatur	III/c	✓	✓	
34	Dekto Maltipa, A Md	D3	Pengatur	III/c	✓	✓	

2	3	4	5	6	7
35 Syamsul Bahri	SLTP	Pengatur Muda TK I	II/b		✓
36 Bujang Busami	SLTA	Pengatur Muda TK I	II/b		✓
37 Elvia Rozana	SI	Pengatur Muda TK I	II/b		✓
38 Rabiul Awal	SLTA	Pengatur Muda TK I	II/b		✓
39 Jamaluddin	SLTA	Pengatur Muda TK I	II/b		✓
40 Amrli, RK	SLTA	Pengatur Muda TK I	II/b		✓
41 Hamisi	SLTA	Pengatur Muda TK I	II/b		✓
42 Wirman	SLTA	Pengatur Muda TK I	II/b		✓
43 Kelli Beminda	SLTA	Pengatur Muda TK I	II/b		✓
44 Hendri Wiraatmaja	SLTA	Pengatur Muda TK I	II/b		✓
45 Hengki	SLTA	Pengatur Muda TK I	II/b		✓
46 Hendri Zaini	SLTA	Pengatur Muda TK I	II/b		✓
47 Febrizal	SLTA	Pengatur Muda TK I	II/b		✓
48 Imbriyanto	SLTA	Pengatur Muda TK I	II/b		✓
49 Aulia Afrinol	SLTA	Pengatur Muda TK I	II/b		✓
50 Bambang Eko Yudo	SLTA	Pengatur Muda TK I	II/b		✓
51 Zulkifli Isa	SLTP	Pengatur Muda	II/a		✓
52 Eppendi	SLTP	Pengatur Muda	II/a		✓
53 Amriyanto	SLTP	Pengatur Muda	II/a		✓
54 Dulfatrizal	SLTP	Juru Muda	I/b		✓

KOTO BARU, 12 FEBRUARI 2017
KEPALA DINAS PERMURUNGAN



Drs DEDDI PERMANA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670810 198809 1 002

REKAPITULASI BELANJA MODAL

SKPO : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
T.A : 2016

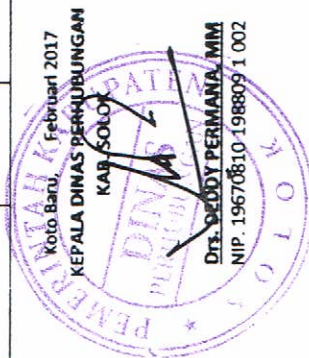
No	Kegiatan/Pekerjaan	Pagu Dana	Nama Perusahaan	Penanggung Jawab Perusahaan	Nomor Kontrak dan Tanggal	Nilai Kontrak (Rp)	Penyelesaian Pekerjaan			Realisasi		Sumber Dana	Ket
							Mulai	Akhir	Keterlambatan	Bobot (%)	Pembayaran	Kurang lebih Pembayaran	
1	Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	Rp 43.000.000	CV. Adiva Network	Damrizal	551.21/02/KPA/Di shub.KI/2016, 26 Februari 2016	Rp 41.635.000	26-Feb-16	07-Mar-16		100%	Rp41.635.000		APBD
2	Belanja Rehab Dermaga Singkarak	Rp 50.000.000	CV. LIMA BERLIAN	Sophia Ulma	551.21/273/KPA/D ishub.KI/2016, tanggal 18 November 2016	Rp 49.330.000	18-Nov-16	23-Dec-16		100%	Rp49.330.000		APBD
3	Pengadaan Tower Internet	Rp 15.000.000	CV. LIMA BERLIAN	Sophia Ulma	551.21/213/KPA/D ishub.KI/2016, tanggal 10	Rp 14.650.000	10-Nov-16	09-Dec-16		100%	Rp14.650.000		APBD
4	Pengadaan Pembatas Arus Jalan	Rp 15.420.000	CV. LIMA BERLIAN	Sophia Ulma	551.21/251/KPA/D ishub.KI/2016, tanggal 1 Desember 2016	Rp 14.987.500	01-Dec-16	14-Dec-16		100%	Rp14.987.500		
5	Lanjutan Pembangunan Terminal Alahan Panjang	Rp 180.000.000	CV. Duta Pratama	Doni Primadi, ST	551.21/23/KPA/Di shub.KI/2016, 13 April 2016	Rp 178.720.000	20-Jun-16	02-Sep-16		100%	Rp178.720.000		APBD
6	Pengadaan RPPJ	Rp 136.756.000	CV. Construction	Ridwan Ahmad	551.21/143/KPA/D ishub.KI/2016, tanggal 19 Oktober 2016	Rp 176.036.000	19/10/2016	02/12/2016		100%	Rp. 40.810.000,- (Termyn I)	-Rp95.225.200	DAK tidak dapat direalisasikan karena yang tersedia pada DAK bidang Transportasi tidak mencukupi, pembayaran akan ditundakanjuti APBD 2017
7	Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	Rp 20.000.000			600/582 28 Oktober 2016	Rp 19.717.500				100%	Rp19.717.500		APBD
8	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	Rp 171.440.000	CV. Construction	Ridwan Ahmad	551.21/03/KPA/Di shub.KI/2016, 29 Februari 2016	Rp 169.900.000	29-Feb-16	28-Apr-16		100%	Rp 169.900.000		DAK



REKAPITULASI BELANJA JASA KONSULTANSI

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
T.A : 2016

No	Kegiatan/Pekerjaan	Pagu Dana	Nama Perusahaan	Penanggung Jawab Perusahaan	Nomor Kontrak dan Tanggal	Nilai Kontrak (Rp)	Proses Pelaksanaan			Realisasi Pembayaran		Ket
							Mulai	Akhir	Keterlambatan	Bobot (%)	Pembayaran	
1	Jasa Perencanaan Perencanaan Garasi Kapal Darat Singkarak	Rp 25.000.000	CV. Majashe Kencana Agung	Amra, ST	551.21/43/KPA/Dishub.KI/2016, 4 April 2016	Rp 24.000.000	04-Apr-16	03-Mai-16		100%	Rp 24.000.000	APBD
2	Perencanaan Lanjutan Pembangunan Ter	Rp 7.000.000	CV. Majashe Kencana Agung	Amra, ST	551.21/43/KPA/Dishub.KI/2016, 29 Februari 2016	Rp 6.780.000	29-Feb-16	29-Mar-16		100%	Rp 6.780.000	APBD
3	Study Kelayakan Terminal Angkutan Bara	Rp 50.000.000	CV. SOLOKARYA DUO ENGINEERING	Ir. ZULFADU TAPA, IAI	551.21/243/KPA/Dishub.KI/2016, tanggal 2 November 2016	Rp 48.500.000	02-Nov-16	01-Dec-16		100%	Rp 48.500.000	APBD
4	Pengawasan Lanjutan Pembangunan Ter	Rp 3.000.000	CV. Lusindo Consultant	Yulizarai	551.21/53/KPA/Dishub.KI/2016, 13 April 2016	Rp 2.880.000	13-Apr-16	1-Jul-16		100%	Rp 2.880.000	APBD
5	Penyusunan Raperda dan Naskah Akademis tentang Penyaliran Radio di Kab. Solok	Rp 45.000.000	CV. SOLOKARYA DUO ENGINEERING	Ir. ZULFADU TAPA, IAI	551.21/263/KPA/Dishub.KI/2016, tanggal 28 Oktober 2016	Rp 44.010.000	28-Okt-16	14-Dec-16		100%	Rp 44.010.000	APBD



LAMPIRAN III.4
KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

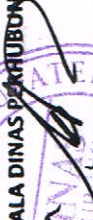
NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN YANG DISELENGGARAKAN : URUSAN PILIHAN

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA)		STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									GOLONGAN/PANGKAT				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL				JUMLAH	KET
		ISI	KOSONG	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV			
Eselon 2	Kepala Dinas	V																V	V		1	
Eselon 3	Sekretaris	V																V	V		1	
Eselon 4	Kasubag Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	V		V																	1	
Eselon 4	Kasubag Keuangan	V						V													1	
Eselon 4	Kasubag Umum dan Kepegawalan	V							V										V		1	
Eselon 3	Kabid Angkutan dan Perizinan	V								V							V				1	
Eselon 4	Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalin	V							V									V			1	
Eselon 4	Kasi Angkutan	V							V									V			1	
Eselon 3	Kabid Pengendalian dan Operasional	V							V									V			1	
Eselon 4	Kasi Penanggulangan Laka dan Tertib Lalin	V							V									V			1	
Eselon 4	Kasi Sarana dan Prasarana Perhubungan	V		V															V		1	
Eselon 3	Kabid Kominfo	V							V												1	
Eselon 4	Kasi Korinfo	V							V												1	
Eselon 4	Kasi Postel	V							V										V		1	
Eselon 4	Kasi Pengawasan dan Pengendalian	V						V													1	
Eselon 4	UPT Alahan Panjang	V		V																	1	
Eselon 4	UPT Surian	V		V																	1	
Eselon 4	UPT Sumani	V		V																	1	
Eselon 4	UPT PKB	V		V															V		1	
Esel. 4b	Ka TU UPT Alahan Panjang	V		V																	1	
Esel. 4b	Ka TU UPT Surian	V						V													1	
Esel. 4b	Ka TU UPT Sumani	V							V												1	
Esel. 4b	Ka TU UPT PKB	V						V	V												1	
	STAF	V		V				V	V												32	
TOTAL																					55	



**PENATAAN KELEMBAGAAN (JABATAN YG ADA DAN JABATAN YG TERISI) DAN JABATAN FUNGSIONAL
DISHUB KOMINFO KABUPATEN SOLOK TAHUN 2016**

NO	JABATAN	ESSELONERING	NAMA	PANGKAT	DIKLAT	KET.
1	Kadis	II/b	Drs Dedy Permana, MM	Pembina Utama Muda IV/c	Diklat PIM TK II	Seluruh belum terisi
2	Sekretaris	III/a	Drs Editiawarman	Pembina TK I . IV/b	Diklat PIM TK II	
3	Kabid Angkutan	III/b	Nurhasanah	Penata TK I, III/d	ADUM	
4	Kabid Operasional	III/b	Teuku Faisal SH	Penata TK I, III/d	ADUM	karena adanya perubahan OPD
5	Kabid Kominfo	III/b	Syamhuris L	Penata III/c	ADUM	
6	Kasubag Perencanaan	IV/a	Mhd. Nasir	Penata III/c	PIM IV	
7	Kasubag Umum dan Kepegawaian	IV/a	Maryusri	Penata III/c	ADUM	PIM IV
8	Kasubag keuangan	IV/a	Aslinda	Penata TK I, III/d	ADUM	
9	Kasi Oerasional	IV/a	Al Kamra Adlis	Penata TK I, III/d	PIM IV	
10	Kasi Sarana dan Prasarana	IV/a	Darma Afrizon	Penata TK I, III/d	PIM IV	ADUM
11	Kasi Angkutan	IV/a	Irman SE	Penata TK I, III/d	ADUM	
12	Kasi Rekayasa Lalin	IV/a	Nugraha S Sos	Penata TK I, III/d		
13	Kasi Postel	IV/a	Erizal	Pembina TK I . IV/b		
14	kasi Kominfo	IV/a	Abdillah	Penata TK I, III/d	ADUM	PIM IV
15	Kasi Pengawasan	IV/a	Fakhri Omaiya S Sos	Penata III/c		
16	Ka UPT PKB	IV/a	Azradi Putra	Penata TK I, III/d		
17	Ka UPT Sumani	IV/a	Noviardi	Penata III/c	PIM IV	Penata Muda TK I III/b
18	Ka UPT Alahan Panjang	IV/a	M Jafar Jamil	Penata TK I, III/d	ADUM	
19	Ka UPT Surian	IV/a	Usman	Penata TK I, III/d		
20	Kasubag TU UPT PKB	IV/b	Susi Erlinda, S Sos	Penata III/c		PIM IV
21	Kasubag TU UPT Sumani	IV/b	Arsyad Fadillah, S. Sit, M.CIO	Penata Muda TK I III/b	Penata Muda TK I III/b	Penata Muda TK I III/b
22	Kasubag TU UPT Alahan Panjang	IV/b	Paiman	Penata Muda TK I III/b		
23	Kasubag TU UPT Surian	IV/b	Yuskar	Penata Muda TK I III/b		

KOTO BARU, FEBRUARI 2017
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Drs DEDDY PERMANA, MM

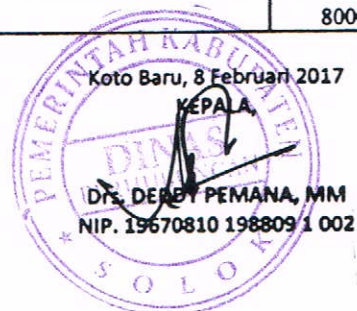
Input Data Variable PERHUBUNGAN (Untuk Wilayah DARATAM)- Kabupaten Solok

FAKTOR UMUM

Indikator	Nilai
Jumlah Penduduk	372,269
Luas Wilayah (Jiwa) (KM2)	3,738
Jumlah APBD	1,277,638,163,411.00

FAKTOR SUBSTANTIF/TEKNIS

Indikator	Nilai
Jumlah rata-rata pertahun Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu lintas untuk Jalan Kabupaten/kota dalam lima tahun terakhir	27
Panjang jalan Kabupaten/kota	1174.01
Ruas Jalan kabupaten/kota	244
Jumlah terminal C	3
Jumlah lokasi perpakiran baik yang dikelola penda maupun pihak swasta (Unit)	8
Jumlah kendaraan bermotor di kabupaten/kota yang wajib uji berkala	4324
jumlah unit angkutan umum dalam kabupaten/kota (unit)	727
jumlah trayek angkutan umum dalam satu daerah kabupaten/kota	37
jumlah armada angkutan laut, pelayaran rakyat, angkutan penyeberangan, dan angkutan sungai dan danau yang berdomisili dalam kabupaten/kota yang beroperasi pada pelabuhan lintas dalam kabupaten/kota	3
jumlah usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal	3
jumlah badan usaha angkutan laut, pelayaran rakyat dan angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau yang berdomisili dalam kabupaten/kota	19
jumlah trayek angkutan laut, angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan angkutan danau pada lintas pelayaran dalam satu kabupaten/kota	2
jumlah pelabuhan pengumpulan lokal dan pelabuhan sungai dan danau yang dimiliki penda kabupaten/kota atau pihak swasta	2
panjang alur pelayaran angkutan sungai, penyeberangan dan laut dalam satu kabupaten/kota (mil laut)	8
jumlah rambu jalan (unit)	1843
Panjang trotoar jalan dalam kabupaten/kota (m)	8000 M



Tabel 2

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Sertifikasi Kalibrasi PKB tidak dapat dilaksanakan.	Untuk tahun 2017 ini akan kita datangkan Tim Tekhnis dari Kementerian Perhubungan Pusat (Balai Pengujian Jambi)
2	Program Pengendalian dan Pengamanan lalu Lintas kegiatan pengadaan rambu-rambu dana DAK fisiknya sudah siap 100 %, tapi keuangannya tidak bisa dicairkan karena keterbatasan anggaran.	Kita usulkan pada tahun 2017 untuk dapat dibayarkan pada anggaran perubahan.



LKPJ - LPPD TA. 2016

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016

Tabel 1

NO	Kode Rekening		URAIAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2		3	4	5	6
1						
2	4	1 2 01 02	Ret. Pel. Sampah/Xebersihan	3,600,000	3,360,000	93.33%
4	4	1 2 01 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	410,000,000	464,274,100	113.24%
7	4	1 2 02 01	Sewa Toko Bangunan Kios	15,560,000	15,800,000	101.54%
8	4	1 2 02 01	Sewa WC	880,000	800,000	90.91%
9	4	1 2 02 04	Retribusi Terminal	131,880,000	84,659,000	64.19%
10	4	1 2 02 04	Retribusi Izin Trayek	18,720,000	15,430,000	82.43%
11	4	1 2 02 12	Retribusi tempat usaha Pos dan Telkom	500,000,000	20,000,000	4.00%
12			Pemakaian Bus Air	10,000,000	6,105,000	61.05%
JUMLAH				1,090,640,000	610,428,100	55.97%



LKPJ - LPPD TA. 2016

a. REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG

Tabel 3

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,897,651,499	3,451,550,452	88.55%
a	Gaji dan Tunjangan	3,275,341,499	2,942,546,252	89.84%
b	Tambahan Penghasilan PNS	622,320,000	509,004,200	81.79%
	JUMLAH	3,897,651,499	3,451,550,452	88.55%



LKPJ - LPPD TA. 2016
Presentase Pelaksanaan Kegiatan Belanja Langsung Tahun 2016
Tabel 4

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
I	URUSAN UMUM, PERHUBUNGAN, TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2,202,487,104	1,887,757,132	85.71%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	351,957,644	339,877,388	96.57%
	1 Penyediaan Alat Tulis Kantor	36,321,224	36,321,000	100.00%
	2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,055,800	4,007,452	98.81%
	3 Belanja Perangko dan Benda Pos lainnya	690,000	684,000	99.13%
	4 Belanja telepon	3,120,000	1,090,040	34.94%
	5 Belanja Air	3,600,000	3,147,560	87.43%
	6 Belanja Listrik	15,600,000	14,531,236	93.15%
	7 Belanja Kawat/Faxsimile	9,500,000	9,600,000	100.00%
	8 Belanja Sertifikasi Kalibrasi	5,000,000	0.00	0.00%
	9 Belanja Premi Asuransi	3,500,000	3,500,000	100.00%
	10 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7,000,000	4,159,400	59.42%
	11 Belanja Cetak	29,702,620	29,634,000	99.77%
	12 Belanja Penggandaan	8,500,000	8,500,000	100.00%
	13 Penyediaan Makan Minum	51,000,000	50,868,000	99.74%
	14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	119,268,000	119,155,000	99.91%
	15 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah	55,000,000	54,679,700	99.42%
II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	237,500,000	236,111,190	99.42%
	1 Belanja peralatan kebersihan dan Bahan Pembersih	10,000,000	9,088,900	90.89%
	2 Belanja BBM dan , Gas dan Pelumas	136,000,000	135,793,990	99.85%
	3 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	78,500,000	78,319,300	99.77%
	4 Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung dan Mesin	2,000,000	1,966,000	98.30%
	5 Belanja Pemeliharaan gedung dan bangunan	5,000,000	4,993,000	99.86%
	6 Belanja pemeliharaan Komputer	2,000,000	1,950,000	97.50%
	7 Belanja pemel. Meobebe/furniture	4,000,000	4,000,000	100.00%
III	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	63,400,000	61,352,500	96.77%
	1 Belanja Modal Pengadaan Komputer/Jaringan	37,000,000	36,217,500	97.89%
	2 Belanja Modal Pengadaan Printer	12,400,000	11,385,000	91.81%

	3	Belanja Modal Pengadaan laptop	14,000,000	13,750,000	98.21%
IV		Program peningkatan disiplin aparatur	77,600,000	76,831,000	99.01%
		1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	77,600,000	76,831,000	99.01%
V		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	40,000,000	26,578,150	66.45%
		1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang	40,000,000	26,578,150	66.45%
V		Program pening. Pengemb. sistim pelaporan capaian kinerja dan keu.	13,050,000	13,049,000	99.99%
		1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13,050,000	13,049,000	99.99%
		URUSAN PERHUBUNGAN	1,418,979,460	1,071,777,214	75.53%
VI		Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	40,539,500	28,535,350	70.39%
		1 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas	40,539,500	28,535,350	70.39%
VII		Program peningkatan pelayanan angkutan	557,531,200	526,437,350	94.42%
		1 Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	505,515,500	475,151,200	93.99%
		2 Pengumpulan dan Analisis Data base Pelayanan Jasa Angkutan	10,000,000	9,727,000	97.27%
		3 Fasilitas perijinan dibidang perhubungan	23,438,300	23,380,000	99.75%
		4 Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mud/awak kendaraan angkutan umum teladan	18,577,300	18,179,150	97.86%
VIII		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	256,386,000	245,956,714	95.93%
		1 Pembangunan Gedung Terminal	256,386,000	245,956,714	95.93%
IX		Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	350,248,540	253,081,950	72.26%
		1 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	161,995,540	65,295,400	40.31%
		2 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	181,896,000	181,430,650	99.74%
		3 Pengadaan Papan Trayek dan Tarif	6,357,000	6,355,900	99.98%
X		Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermoto	18,000,000	17,765,850	98.70%
		1 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	8,000,000	7,765,850	97.07%
		2 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotr	10,000,000	10,000,000	100.00%
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana LLASDP	70,000,000	68,389,250	97.70%
		1 Rehab Dermaga	70,000,000	68,389,250	97.70%
		URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	126,274,220	123,533,190	97.83%
XI		Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	68,840,800	66,271,600	96.27%

XII	1 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi serta pengawasan	68,840,800	66,271,600	96.27%
	Program kerjasama informasi dan media massa	57,433,420	57,261,590	99.70%
	2 Penyebar luasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi	57,433,420	57,261,590	99.70%
JUMLAH		2,202,487,104	2,079,679,572	94.42%

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

 Drs DEDDY PERMANA, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670810 198809 1 002